



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 15 Agustus 2023

Halaman: 5

Butuh Insinerator Tekan Volume Limbah

■ Pemkot Yogya Usulkan Rp16 Miliar untuk Tangani Sampah

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya mengusulkan alokasi Rp16 miliar untuk percepatan penanganan sampah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023. Tambahan alokasi anggaran itu, salah satunya digunakan untuk pengadaan mesin pembakar sampah atau insinerator.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Ririk Banowati, mengatakan, angka tersebut merupakan dalam rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2023, Jumat (11/8). Pada kesempatan tersebut, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyepakati nilai anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan sampah Rp16 miliar.

"Memang belum final, nanti masih dibahas di Badan Anggaran. Tapi, secara prinsip kami sepakat perubahan anggaran Rp16 miliar untuk penanganan masalah sampah," ujarnya, Senin (14/8).

Menurutnya, nilai yang diajukan memang cukup besar, karena mayoritas bakal dialokasikan untuk pengadaan teknologi pengolahan sampah dan armada. Legistad pun tidak terluh, permasalahan hal itu, selama penambahan anggaran yang diajukan di perubahan benar-benar dilaksanakan selaras target.

"Alat untuk pengelolaan, pembelian insinerator, kami sepakat itu. Tapi, penambahan anggaran yang diajukan DLH harus sesuai target. Ini perlu dipikirkan, dari sisi waktu dan lain sebagainya," ungkap Ririk.

Menurut Ririk, jangan sampai saat sudah di-anggarkan di perubahan, tetapi tidak dapat dilaksanakan. Politikus Partai Gerindra itu pun meyakini, pengadaan insinerator yang bakal ditempatkan di TPST 3R Nihon sangat efektif untuk mengatasi problem persampahan Kota Yogya yang terdapat keterbatasan lahan. Lalu, rencana pembelian beberapa armada pengangkut sampah saat ini juga terbilang monev.

"Insinerator akan efektif. Kemudian, untuk armada itu, selain dump truck, ada penambahan pickup L300 juga, untuk mengangkut tumpukan sampah di gang-gang kecil, di kawasan perkampungan," katanya.

Hal ini, kata dia, sudah

sesuai program DLH. Apalagi, usulan ini tidak mendadak, sudah direncanakan. "Karena kalau semua dibebankan di APBD murni tidak akan cukup, maka dimasukkan APBD perubahan," imbuh Ririk.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto, mengatakan, penambahan anggaran untuk percepatan penanganan sampah lebih dititikberatkan. Meski demikian, ia menyebut, masa darurat sampah bisa teratasi jika pengurangan di hulu lewat gerakan zero sampah anorganik dan Mhah Dirjo sangguy dijalankan bersama oleh warga masyarakat.

"Penanggulangan sampah harus semuanya berperan aktif. Mendorong masyarakat supaya mengurangi dan memilah itu yang paling utama. Jadi, kami fokus di sumber sampahnya," tegas Sugeng.

Berubah maula

Di sisi lain, gerakan Mhah Dirjo (Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jagal) yang sudah digulirkan di Kota Yogya sejak Juli lalu perlahan mulai membuahkan hasil. Tercait, sejauh ini 16 ribu biopori dengan berbagai metode mulai direalisasikan warga masyarakat, sehingga sampah organik yang dibuang menuju TPA Pyungon semakin tereduksi.

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Singih Raghoro, menyampaikan, 16 ribu biopori yang terrealisasi hingga pekan lalu, diklaim berhasil mengurangi antara 20-25 persen sampah harian yang diproduksi di wila-

ATASI MASALAH

- Pemkot Yogya usulkan alokasi Rp16 miliar untuk percepatan penanganan sampah.
- Usulan alokasi ini dituangkan dalam APBD Perubahan 2023.
- Salah satu alokasi untuk pengadaan mesin pembakar sampah atau insinerator.

yahya. Sebagai informasi, berdasarkan data terkini, dalam satu hari sampah yang diproduksi dan belum dikelola di penjuru Kota Yogya, masih ada di kisaran 200 ton.

Pengurangan 25 persen itu berarti sekitar 50 ton per hari. Itu sampah organik dari rumah tangga, pelaku usaha, hingga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkot," ungkapnya, Senin.

Stragih menyatakan, pengurangan tersebut tentunya sangat berarti, karena sampai sejauh ini pembangunan menuju TPA Pyungon dari Kota Yogya masih dibatasi 100 ton per hari saja. Sehingga, masih ada sekitar 100 ton sampah yang belum dikelola dan tidak bisa dialokasikan ke tempat pembuangan akhir di Bantul itu, lantaran terdampak pembelian akses TPA.

Tapi TPA (Banyuwero) di Kulonprogo bisa menampung 15 ton sampah dari kota, kemudian TPST 3R di Nihon juga terus kami optimalkan itu," urai PJ Wali Kota, (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005